

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Museum merupakan salah satu lembaga informasi yang memiliki fungsi serupa dengan perpustakaan dan lembaga kearsipan dalam menyediakan, mengelola, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang mengelola informasi budaya dan benda bersejarah, museum berperan penting dalam proses akuisisi, dokumentasi, konservasi, serta diseminasi informasi mengenai warisan budaya (International Council of Museums/ICOM, 2017). Menurut Santosa (2016), museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan artefak, tetapi juga sebagai pusat informasi yang menyediakan pengetahuan melalui berbagai media seperti katalog, pameran, publikasi, dan layanan edukasi. Sementara itu, Lasa HS (2020) menegaskan bahwa museum, perpustakaan, dan arsip merupakan *memory institutions* yang memiliki tujuan serupa, yaitu melestarikan sumber informasi agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan masa depan. Dengan demikian, museum berperan bukan hanya sebagai ruang pamer, tetapi juga sebagai lembaga informasi yang menyediakan akses pengetahuan secara fisik maupun digital. Sebagai lembaga informasi yang memegang peranan penting dalam pelestarian pengetahuan budaya, museum juga menjadi institusi yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan identitas suatu masyarakat.

Sejarah, tradisi, dan benda-benda budaya merupakan modal utama pembentuk identitas suatu masyarakat. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, keberadaan budaya tidak hanya menghadapi tantangan berupa potensi hilangnya identitas budaya, tetapi juga kerusakan fisik artefak serta benda-benda budaya yang diakui sebagai cagar budaya, disertai dengan hilangnya konteks sejarah dan nilai informatif yang melekat pada benda tersebut. Dalam konteks ini, museum sebagai institusi pelestari koleksi budaya memegang peranan strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya material. Museum tidak

hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda koleksi budaya, tetapi juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelestarian nilai informasi koleksi, seperti asal-usul benda, teknik pembuatan, latar belakang sosial-budaya, makna simbolik, serta fungsi dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik ritual dan tradisi.

Digitalisasi telah muncul sebagai strategi modern yang tidak hanya “mengubah benda fisik menjadi versi digital”, melainkan sebagai metode pelestarian informasi, mitigasi risiko terhadap kerusakan, serta upaya memperluas akses dan edukasi budaya (Agustinova, D. E. 2022). Menurut Harvey (2020), proses digitalisasi mencakup pengelolaan koleksi digital mulai dari penciptaan, dokumentasi, pemeliharaan, hingga penyediaan akses jangka panjang. Dengan kata lain, digitalisasi tidak cukup dipandang hanya sebagai aktivitas memotret atau memindai objek, tetapi sebagai bagian dari sistem preservasi digital yang lebih luas. Hal ini selaras dengan pandangan Hedstrom (1998) yang menekankan pentingnya strategi jangka panjang, migrasi format, serta standarisasi metadata agar file digital tetap dapat diakses meskipun teknologi berubah. Selain itu, Conway (1996) mengingatkan bahwa preservasi digital harus menjaga otentisitas, integritas, dan konteks budaya dari koleksi yang didigitalkan, sementara Gilliland (2012) menekankan perlunya ekosistem kebijakan, infrastruktur, dan manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan data digital. Berbagai pandangan teori tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi berperan bukan hanya dalam pelestarian fisik, melainkan juga pelestarian nilai budaya dan pengetahuan. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi langkah penting bagi museum dalam memperluas akses, memperkuat edukasi, serta memitigasi risiko hilangnya informasi budaya.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi koleksi museum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari ANTARA Sumatera Barat menunjukkan bahwa Museum Adityawarman, salah satu museum daerah besar di Indonesia, memiliki lebih dari 6.000 koleksi budaya yang mencakup berbagai kategori, seperti etnografika, arkeologika, dan keramologika, namun sebagian besar koleksi tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi dan diakses melalui sistem digital terpadu (ANTARA Sumatera Barat, 2016). Temuan ini menunjukkan bahwa

kepemilikan koleksi dalam jumlah besar belum selalu diikuti oleh kemampuan pengelolaan digital yang optimal.

Berbagai penelitian terdahulu juga mengungkapkan kendala serupa di museum-museum Indonesia. Setyawan (2024) menemukan bahwa university museum di Indonesia masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Sementara itu, Wiastuti et al. (2020) dalam penelitiannya terhadap museum di Jakarta menunjukkan bahwa hanya sebagian museum yang telah menyediakan akses informasi koleksi secara digital, sedangkan museum lainnya masih terbatas pada penyajian konvensional. Kendala lain yang turut diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya kebijakan institusi, serta tantangan penyimpanan digital jangka panjang (Ilyasa, 2024). Di sisi lain, fungsi museum sebagai pusat edukasi dan dokumentasi budaya menjadi semakin penting di era digital, seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap informasi berbasis teknologi, karakter generasi muda yang akrab dengan media digital, serta kebutuhan akademik dan riset yang menuntut akses data koleksi secara daring. Pandemi COVID-19 turut meningkatkan kesadaran akan urgensi digitalisasi museum, karena keterbatasan akses fisik ke ruang pameran mendorong museum untuk menyediakan alternatif akses informasi secara digital. Namun demikian, transformasi digital museum yang bersifat menyeluruh meliputi aspek teknologi, sumber daya manusia, kebijakan institusi, dan sistem penyimpanan informasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara komprehensif di banyak museum di Indonesia.

Museum Adityawarman di Padang, Sumatera Barat, merupakan lembaga pelestarian budaya yang memegang peranan strategis dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya Minangkabau. Museum ini didirikan pada tahun 1974–1975 dan diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977. Secara kelembagaan, Museum Adityawarman merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Adityawarman yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dalam struktur pengelolaannya, museum ini memiliki tugas pokok dan fungsi meliputi

pengumpulan, pengamanan, perawatan, penelitian, pemanfaatan, serta penyajian koleksi kepada masyarakat sebagai sumber informasi, pendidikan, dan pelestarian budaya daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wirda Arora, S.E. selaku Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan dan penelusuran data inventaris internal UPT Museum Adityawarman sebagai bagian dari riset pendahuluan, diketahui bahwa hingga tahun penelitian museum ini mengelola sebanyak 6.318 koleksi. Koleksi tersebut diklasifikasikan ke dalam sepuluh kategori, yaitu Arkeologika, Biologika, Etnografika, Filologika, Geologika, Historika, Keramalogika, Numismatika/Heraldika, Seni Rupa, dan Teknologika. Secara rinci, komposisi koleksi terdiri atas koleksi etnografika sebanyak 4.458 objek, keramalogika sebanyak 769 objek, numismatika/heraldika sebanyak 440 objek, seni rupa sebanyak 144 objek, arkeologika sebanyak 100 objek, filologika sebanyak 81 objek, historika sebanyak 69 objek, teknologika sebanyak 69 objek, geologika sebanyak 36 objek, serta biologika sebanyak 31 objek, dengan total keseluruhan 6.318 koleksi. Penyajian data rinci ini menunjukkan bahwa penulisan latar belakang penelitian didasarkan pada riset pendahuluan yang bersumber dari inventaris resmi museum.

Berdasarkan komposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kategori etnografika merupakan koleksi yang paling mendominasi dibandingkan kategori koleksi lainnya. Dominasi koleksi etnografika ini mencerminkan kuatnya representasi kehidupan sosial, adat istiadat, sistem nilai, serta praktik budaya masyarakat Minangkabau, sekaligus menunjukkan fokus utama Museum Adityawarman dalam pelestarian budaya daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara fisik, Museum Adityawarman menempati bangunan dan lahan yang pengelolaannya ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan dan pengelolaan internal UPT Museum Adityawarman, yang difungsikan untuk ruang pamer tetap, pameran temporer, penyimpanan koleksi, konservasi, administrasi, serta pelayanan publik. Keberadaan infrastruktur tersebut mendukung peran museum tidak hanya sebagai tempat penyimpanan artefak, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan dan penyediaan informasi budaya yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan fungsi pelestarian dan penyebarluasan informasi koleksi, upaya digitalisasi di Museum Adityawarman telah dilakukan sejak tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2024. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Wirda Arora, S.E., selaku Kepala Seksi Konservasi dan Pengembangan UPT Museum Adityawarman, bahwa kegiatan digitalisasi merupakan strategi pelestarian informasi, khususnya terhadap koleksi naskah kuno dan koleksi lain yang rentan mengalami kerusakan fisik serta pemudaran informasi. Hingga tahun 2025, jumlah koleksi yang telah berhasil didigitalisasi mencapai sekitar 1.500 koleksi dari total 6.318 koleksi, atau setara dengan $\pm 23,7\%$ dari keseluruhan koleksi museum. Pelaksanaan digitalisasi dilakukan berdasarkan rencana kerja UPT Museum Adityawarman, yang diawali dengan proses identifikasi dan seleksi koleksi, dilanjutkan dengan dokumentasi melalui pemotretan di lingkungan museum oleh pihak ketiga yang ditunjuk secara resmi, pengolahan dan penyuntingan data visual, penyusunan katalog digital, serta pembuatan barcode koleksi. Seluruh data digital tersebut kemudian diunggah ke dalam Sistem Informasi Koleksi Museum yang terintegrasi dengan situs resmi Museum Adityawarman sebagai media akses informasi bagi masyarakat.

Sarana dan prasarana digitalisasi di Museum Adityawarman hingga saat ini masih berada pada tahap pengembangan dan belum sepenuhnya memenuhi standar ideal digitalisasi koleksi museum. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan awal, perangkat yang dimiliki museum saat ini meliputi kamera digital standar, komputer pengolahan data, serta perangkat lunak pengelolaan koleksi, namun belum dilengkapi dengan perangkat digitalisasi khusus seperti scanner profesional untuk naskah kuno, kamera beresolusi tinggi dengan standar dokumentasi museum, studio pemotretan khusus, maupun sistem server internal yang terintegrasi secara penuh. Kondisi ini berbeda dengan kebutuhan ideal digitalisasi museum yang seharusnya didukung oleh perangkat pemindaian khusus, ruang dokumentasi terstandar, sistem penyimpanan berlapis, serta panduan teknis digitalisasi yang baku.

Keterbatasan sarana tersebut berdampak pada pelaksanaan digitalisasi koleksi yang hingga tahun 2024 sebagian masih dilakukan menggunakan kamera

biasa atau perangkat telepon seluler, terutama pada tahap dokumentasi visual. Dalam pelaksanaannya, museum melibatkan pihak ketiga sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk membantu proses dokumentasi koleksi tertentu. Pelibatan pihak ketiga dilakukan melalui mekanisme kerja sama berbasis kontrak kerja yang ditetapkan oleh pengelola museum, mengingat koleksi yang didigitalisasi merupakan benda bernilai budaya tinggi dan membutuhkan penanganan khusus. Skema ini dipilih sebagai solusi sementara untuk mengatasi keterbatasan perangkat dan tenaga teknis internal museum.

Kondisi yang dihadapi Museum Adityawarman tersebut sejalan dengan temuan penelitian Dwi Astuti (2022) dalam artikel berjudul “Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Digitalisasi Museum Negeri Sonobudoyo” yang menyebutkan bahwa keterbatasan perangkat digital, minimnya tenaga teknis, serta keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan digitalisasi museum daerah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa digitalisasi museum idealnya didukung oleh infrastruktur digital seperti scanner khusus, penyimpanan berbasis server dan cloud, serta pedoman teknis digitalisasi yang terstandar, agar proses pelestarian koleksi dapat berjalan secara optimal (Astuti, 2022).

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Siti Nurfadilah (2023) dalam penelitian “Evaluasi Infrastruktur Digitalisasi Museum di Indonesia Timur”, yang menunjukkan bahwa sebagian besar museum daerah belum memiliki scanner profesional, studio dokumentasi, dan sistem pengarsipan digital terintegrasi. Keterbatasan fasilitas tersebut berdampak pada kualitas hasil digitalisasi serta meningkatkan ketergantungan museum terhadap pihak eksternal. Kedua penelitian ini memperkuat bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor krusial yang memengaruhi kualitas dan kesinambungan program digitalisasi, termasuk yang terjadi di Museum Adityawarman. Dalam menjaga nilai budaya koleksi, Museum Adityawarman berupaya memastikan bahwa proses digitalisasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pelestarian makna budaya. Untuk itu, museum membentuk tim penyusunan metadata yang melibatkan tenaga internal museum serta didukung oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM Suri) dan tenaga ahli dari latar belakang sejarah dan antropologi. Tim ini bertugas menyusun

deskripsi koleksi dan metadata agar informasi digital tetap mencerminkan konteks budaya dan nilai-nilai Minangkabau.

Dukungan pendanaan kegiatan digitalisasi di Museum Adityawarman mulai diperoleh sejak tahun 2023 melalui Dana Alokasi Fisik (DAF) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan ini digunakan untuk mendukung kegiatan dokumentasi, pengolahan data digital, serta pengembangan sistem informasi koleksi. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan perangkat digital masih menjadi kendala utama dalam percepatan digitalisasi koleksi. Hasil digitalisasi koleksi diunggah ke dalam website resmi Museum Adityawarman sebagai bentuk perluasan akses informasi bagi masyarakat. Setiap koleksi digital dilengkapi dengan barcode yang memungkinkan pengunjung memperoleh informasi koleksi secara langsung melalui pemindaian. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan, museum sedang melaksanakan pemutakhiran data koleksi dan penataan ulang tata pameran, sehingga penggunaan barcode sementara ditarik untuk disesuaikan dengan data terbaru.

Berdasarkan penelusuran dokumen dan konfirmasi kepada pihak pengelola, Museum Adityawarman belum menjalin kerja sama formal dengan perguruan tinggi, namun telah bekerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat di bidang pelestarian budaya, khususnya dalam kegiatan pendataan dan verifikasi informasi koleksi. Selain itu, pengembangan pameran digital mulai direncanakan dan dituangkan dalam rencana kerja UPT Museum Adityawarman tahun 2024–2025, sebagai tindak lanjut arahan kementerian terkait pemanfaatan koleksi digital secara interaktif bagi publik. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan digitalisasi koleksi Museum Adityawarman pada periode tahun 2022–2024, dengan fokus kajian pada tahapan seleksi koleksi, dokumentasi digital, penyusunan metadata, sistem penyimpanan, serta publikasi daring. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana nilai informatif dan makna budaya koleksi tetap dipertahankan, serta bagaimana museum menghadapi keterbatasan teknis dan sumber daya dalam menjalankan digitalisasi.

Preservasi digital di Museum Adityawarman dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam melestarikan budaya Minangkabau di era teknologi, yang

mengintegrasikan pelestarian fisik koleksi dengan pelestarian informasi. Meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana, anggaran, dan sumber daya manusia, komitmen museum dalam menjaga nilai historis dan budaya koleksi tetap diwujudkan melalui digitalisasi bertahap. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) digitalisasi koleksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kebijakan digitalisasi budaya daerah yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses seleksi koleksi budaya Minangkabau yang diprioritaskan untuk kegiatan digitalisasi di Museum Adityawarman?
2. Bagaimana proses pemindaian atau fotografi digital dilakukan terhadap koleksi budaya Minangkabau di Museum Adityawarman?
3. Bagaimana proses penyusunan metadata dan pengelolaan informasi digital dilakukan untuk menjaga nilai informatif koleksi?
4. Bagaimana akses dan penyimpanan hasil digitalisasi diatur untuk mendukung pelestarian dan keterbukaan informasi publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses preservasi koleksi budaya Minangkabau melalui kegiatan digitalisasi di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian warisan budaya daerah di era teknologi. Fokus utama diarahkan pada bagaimana museum mengelola proses digitalisasi agar nilai informatif, historis, dan makna budaya setiap koleksi tetap terjaga. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan proses seleksi koleksi budaya Minangkabau yang didigitalisasi di Museum Adityawarman.
2. Menjelaskan tahapan pemindaian dan dokumentasi digital dalam kegiatan preservasi koleksi museum.

3. Menganalisis penerapan metadata dan deskripsi digital sebagai strategi menjaga nilai informatif koleksi.
4. Mengevaluasi pengelolaan akses dan penyimpanan hasil digitalisasi dalam mendukung pelestarian dan keterbukaan informasi publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya dalam bidang preservasi digital dan manajemen koleksi budaya. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana konsep preservasi digital diterapkan pada konteks museum daerah, bukan hanya pada lembaga arsip atau perpustakaan. Hasil kajian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti integrasi antara pelestarian budaya, teknologi informasi, dan pengelolaan metadata koleksi. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi digitalisasi koleksi budaya di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan nilai informatif, historis, dan kontekstual dari objek budaya lokal.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Pihak Museum Adityawarman, sebagai masukan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) digitalisasi koleksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perencanaan pengadaan sarana dan prasarana digital yang lebih memadai.
- b. Pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan digitalisasi museum daerah agar pelestarian budaya dapat berjalan berkelanjutan dan inklusif.

- c. Mahasiswa dan peneliti bidang ilmu perpustakaan, informasi, serta kebudayaan, sebagai bahan referensi empiris dalam memahami praktik digitalisasi koleksi budaya di lapangan.
- d. Masyarakat umum, khususnya generasi muda, sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya lokal melalui pemanfaatan teknologi digital.

